



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

**LAMPIRAN XI TAHUN 2025
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026**

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026.....	6
2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2025 Kota Padang Panjang	6
2.1.2 Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan.....	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.....	20
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.....	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	31
BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..	34
3.3 Program dan Kegiatan.....	36
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38
BAB V Penutup.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2025 Kota Padang Panjang.....	8
Tabel 2.1.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Keuangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2025.....	16
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21
Tabel 2.3	Pemetaan Permasalahan	22
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Padang Panjang	26
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Padang Panjang.....	31
Tabel 3.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.....	34
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	35
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Padang Panjang	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hasil evaluasi hasil Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan rancangan awal Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2026. Dokumen Renja Tahun 2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui tahapan, meliputi :

1. Persiapan penyusunan

Meliputi pembentukan tim penyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026, pengumpulan hasil evaluasi renja tahun 2024 dan pengendalian kegiatan tahun 2025.

2. Tahap perumusan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi :

- a. Pengolahan data dan informasi
- b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
- f. Perumusan tujuan dan sasaran
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
- h. Perumusan kegiatan prioritas
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- j. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- k. Pembahasan forum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. Penyusunan rancangan

Sinkronisasi dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2026, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Tahap penyajian rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir
6. Tahap Penetapan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesi Nomor 6975);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran daderah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2);
15. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan

sub kegiatan Tahun 2026 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2026.
2. Sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Tahun 2024

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d. Tahun 2025, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan Dan Sasaran

Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 dan Perkiraan Maju tahun 2027)

Bab V Penutup

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2024-2026

2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2025 Kota Padang Panjang

Kualitas Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 terhadap target kinerja Tahun 2024. Hal ini juga perlu dilihat hasil evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 dengan kinerja Tahun 2024.

Secara umum, pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2025 Kota Padang Panjang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
2 12	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2 12 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	100.00%		98.00%	98.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	882		294	294	100.00%	294	294	33.33%
			Orang/Bulan		Orang/Bulan	Orang/Bulan		Orang/Bulan	Orang/Bulan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
2 12 01 2.05 01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21		17	17	100.00%	0	0	0.00%
			Paket		Paket	Paket		Paket	Paket	
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	29.86%
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12		10	10	100.00%	1	1	8.33%
			Paket		Paket	Paket		Paket		
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan yang disediakan	12		2	2	100.00%	9	9	75.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
			Paket		Paket	Paket		Paket	Paket	
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36		2	2	100.00%	1	1	2.78%
			Paket		Paket	Paket		Paket	Paket	
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72		24	24	100.00%	24	24	33.33%
			Laporan		Laporan	Laporan		Laporan	Laporan	
2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2 12 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7		13	13	100.00%	1	1	14.29%
			Unit		Unit	Unit		Unit	Unit	
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144		36	36	100.00%	36	36	25.00%
			Laporan		Laporan	Laporan		Laporan	Laporan	
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36		6	6	100.00%	5	5	13.89%
			Laporan		Laporan	Laporan		Laporan	Laporan	
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2 12 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27		9	9	100.00%	9	9	33.33%
			Unit		Unit	Unit		Unit	Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51		19	19	100.00%	17	17	33.33%
			Unit		Unit	Unit		Unit	Unit	
2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3		1	1	100.00%	1	1	33.33%
			Unit		Unit	Unit		Unit	Unit	
2 12 02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan	100%		98.00%	98.00%	100.00%			
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital						34%	34%	0.00%
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak						98.64%	98.64%	0.00%
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang Terlayani terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk	100.00%		98.00%	98.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		Perekaman KTP Elektronik						97.85%	97.85%	0.00%
2 12 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	9000		0	0	0.00%	4500	4500	50.00%
			Dokumen		Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	39		9	9	100.00%	13	13	33.33%
			Laporan		Laporan	Laporan		Laporan	Laporan	
2 12 02 2.01 05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	4500		4500	4500	100.00%	0	0	0.00%
			Dokumen		Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	
2 12 02 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pendaftaran Penduduk yang terlaksana	100.00%		98.00%	98.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
2 12 02 2.02 01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	2		0	0	0.00%	1	1	50.00%
			Dokumen		Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	
2 12 02 2.02 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	30000		5500	5500	100.00%	6000	6000	20.00%
			Dokumen		Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	
2 12 02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1		1	1	100.00%	1	1	100.00%
			Jenis		Jenis	Jenis		Jenis	Jenis	
2 12 02 2.03 05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	3		1	1	100.00%	1	1	33.33%
			Laporan		Laporan	Laporan		Laporan	Laporan	
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil Usia 0-18 Tahun	100.00%		98.00%	100.00%	102.04%			
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan						100.00%	100.00%	0.00%
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan						100.00%	100.00%	0.00%
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan						100.00%	100.00%	0.00%
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan						100.00%	100.00%	0.00%
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun	6000		2000	2011	100.55%	1300	1300	21.67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
			Akta		Akta	Akta		Akta	Akta	
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Usia 0-18 Tahun	6000		2000	2011	100.55%	1300	1300	21.67%
			Layanan		Layanan	Layanan		Layanan	Layanan	
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%			
		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan						100.00%	100.00%	0.00%
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	36		12	12	100.00%	12	12	33.33%
			Laporan		Laporan	Laporan		Laporan	Laporan	
2 12 04 2.03 03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36		12	12	100.00%	12	12	33.33%
			Laporan		Laporan	Laporan		Laporan	Laporan	
2 12 04 2.03 04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	6		1	1	100.00%	0	0	0.00%
			Dokumen		Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	
2 12 04 2.03 05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3		0	0	0.00%	1	1	33.33%
			Laporan		Laporan	Laporan		Laporan	Laporan	
2 12 04 2.03 07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	15		5	5	100.00%	5	5	33.33%
			Laporan		Laporan	Laporan		Laporan	Laporan	
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Dokumen Profil dan Agregat Kependudukan	9		3	3	100.00%			
			Dokumen		Dokumen	Dokumen				
		Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan						100.00%	100.00%	0.00%
2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil dan Agregat Kependudukan	9		3	3	100.00%	3	3	33.33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
			Dokumen		Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	
2 12 05 2.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	9		3	3	100.00%	3	3	33.33%
			Dokumen		Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2025 di atas dapat dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 Program Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator program persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 100% dan persentase capaiannya sebesar 100%. Program ini terdiri dari 6 kegiatan dan 12 sub kegiatan yang dilaksanakan.
2. Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator kinerja persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 100% dan persentase capaiannya sebesar 100%. Program ini terdiri dari 3 Kegiatan dengan 4 Sub Kegiatan yang dilaksanakan.
3. Program Pencatatan Sipil dengan indikator program persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil dengan target tahun 2024 sebesar 98% dan persentase capaian kinerjanya sebesar 100%. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan.
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator jumlah pengelolaan informasi administrasi dokumen kependudukan dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan persentase capaiannya sebesar 100%. Program ini terdiri dari 3 kegiatan dengan 4 sub kegiatan yang dilaksanakan.
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indikator persentase keakuratan data dengan target tahun 2024 3 dokumen dan capaiannya 3 dokumen serta persentase capaiannya sebesar 100%. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan.

2.1.2 Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2024 dan anggaran tahun 2025 beserta perkiraan target realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Keuangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
1	2	3	4	5= 4/3	6	7	8=7/6
2 12	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4,057,628,016	3,912,943,036	96.43%	3,396,332,938	3,396,332,938	100.00%
2 12 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,577,450,516	3,480,541,758	97.29%	2,960,265,948	2,960,265,948	100%
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,590,367,486	2,584,765,405	99.78%	2,337,287,819	2,337,287,819	100%
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,590,367,486	2,584,765,405	99.78%	2,337,287,819	2,337,287,819	100%
2 12 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8,500,000	8,500,000	0.00%	-	-	100%
2 12 01 2.05 01	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8,500,000	8,500,000	100.00%	-	-	
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	262,437,250	240,627,202	91.69%	112,395,705	112,395,705	100%
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,658,500	1,295,000	78.08%	2,114,200	2,114,200	100%
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,023,300	20,042,450	80.10%	15,991,305	15,991,305	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
1	2	3	4	5= 4/3	6	7	8=7/6
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,557,450	6,273,000	95.66%	4,167,700	4,167,700	100%
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229,198,000	213,016,752	92.94%	90,122,500	90,122,500	100%
2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223,192,000	198,866,400	0.00%	5,564,900	5,564,900	100%
2 12 01 2.07 05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	223,192,000	198,866,400	89.10%	5,564,900	5,564,900	100%
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192,941,780	183,471,855	95.09%	223,521,524	223,521,524	100%
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27,465,780	27,043,589	98.46%	41,461,524	41,461,524	100%
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165,476,000	156,428,266	94.53%	182,060,000	182,060,000	100%
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300,012,000	264,310,896	88.10%	281,496,000	281,496,000	100%
2 12 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	208,258,000	198,116,296	95.13%	204,598,000	204,598,000	100%
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,330,000	5,125,000	16.90%	27,030,000	27,030,000	100%
2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61,424,000	61,069,600	99.42%	49,868,000	49,868,000	100%
2 12 02	Program Pendaftaran Penduduk	185,961,100	156,675,700	84.25%	200,474,680	200,474,680	100%
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	64,311,200	57,819,700	89.91%	6,218,840	6,218,840	100%
2 12 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				788,840	788,840	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
1	2	3	4	5= 4/3	6	7	8=7/6
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	29,442,300	25,608,100	86.98%	5,430,000	5,430,000	100%
2 12 02 2.01 05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	34,868,900	32,211,600	92.38%	-	-	
2 12 02 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	100,397,000	79,850,000	79.53%	161,055,640	161,055,640	100%
2 12 02 2.02 01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk				5,564,900	5,564,900	100%
2 12 02 2.02 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	100,397,000	79,850,000	79.53%	155,490,740	155,490,740	100%
2 12 02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	21,252,900	19,006,000	89.43%	33,200,200	33,200,200	100%
2 12 02 2.03 05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	21,252,900	19,006,000	89.43%	33,200,200	33,200,200	100%
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	122,286,800	119,053,904	97.36%	101,779,310	101,779,310	100%
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	122,286,800	119,053,904	97.36%	101,779,310	101,779,310	100%
2 12 03 2.01 02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	122,286,800	119,053,904	97.36%	101,779,310	101,779,310	100%
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	153,559,600	141,480,374	92.13%	123,832,000	123,832,000	100%
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	153,559,600	141,480,374	92.13%	123,832,000	123,832,000	100%
2 12 04 2.03 03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	21,401,100	20,090,200	93.87%	25,152,000	25,152,000	100%
2 12 04 2.03 04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1,260,000	1,228,500	97.50%	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
1	2	3	4	5= 4/3	6	7	8=7/6
2 12 04 2.03 05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				9,336,000	9,336,000	100%
2 12 04 2.03 07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	130,898,500	120,161,674	91.80%	89,344,000	89,344,000	100%
2 12 5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	18,370,000	15,191,300	82.70%	9,981,000	9,981,000	100%
2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	18,370,000	15,191,300	82.70%	9,981,000	9,981,000	100%
2 12 05 2.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	18,370,000	15,191,300	82.70%	9,981,000	9,981,000	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran. Target evaluasi capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tiga sasaran, diantaranya: sasaran pertama “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator kinerja sasaran yakni, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dengan target sebesar 98,82, sasaran kedua “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pemerintahan dan Masyarakat” dengan indikator kinerja sasaran yakni, “Persentase Pemanfaatan dan Ketersediaan Data Kependudukan yang Akurat dan Informatif” dengan target sebesar 100%, dan sasaran ketiga “Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja sasaran yakni, Nilai AKIP OPD dengan target sebesar 73,86. Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2025	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Perekaman KTP elektronik		Perekaman KTP elektronik	99,14	97,85	98,05	99,00	99,14	97,85	97,85			
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	96,99	98,64	98,84	99,00	96,99	98,64	98,64			
3	Kepemilikan akta kelahiran		Kepemilikan akta kelahiran	91,61	100,00	100,00	100,00	91,61	100,00	100,00			
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
5	Rate Nett Recent Migrasi		Rate Nett Recent Migrasi		3,32	3,2	3,1	3,32	3,32	3,32			
6	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita		100,00	100,00	100,00	99,91	100,00	100,00			
7	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai		Cakupan Kepemilikan Akta Cerai		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
8	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah		Cakupan Kepemilikan Akta Nikah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
9	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian		Cakupan Kepemilikan Akta Kematian		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disadari bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Adapun Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi aspek fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan serta pengolahan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administratif dan sanksi pidana terkait administrasi kependudukan.

Belum terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan	Belum optimalnya aktivasi identitas digital	Restrukturisasi anggaran terkait kegiatan penyediaan jasa jaringan komunikasi data oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri
		Pengelolaan arsip yang belum optimal	Saat ini tidak ada satu pun SDM tersedia untuk melakukan pengelolaan arsip karena pegawai lama yang pensiun dan tidak ada penggantinya

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Pemanfaatan data bagi SKPD masih terbatas	Belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pemanfaatan data oleh Perangkat Daerah lain (Jaringan VPN)
			Pemanfaatan data dalam menjawab bonus demografi (Pekerjaan dan penjaminan kualitas hidup usia non produktif)
2.	Masih terbatasnya Jarkomdat (Jaringan Komunikasi Data)	Efisiensi dari Dirjen Dukcapil untuk kegiatan lapangan	Restrukturisasi anggaran terkait kegiatan penyediaan jasa jaringan komunikasi data oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri
3.	Belum adanya Setifikat ISO 27001 kepada seluruh OPD	Masih rendahnya pemahaman OPD terkait sertifikasi ISO 27001	Keuangan Daerah belum bisa mengakomodir Pelaksanaan Sertifikasi ISO 27001
4.	Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan	Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui informasi dan prosedur yang jelas tentang administrasi kependudukan dan manfaatnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat.	Akses terhadap pelayanan kependudukan yang belum merata
5.	Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM	1.Kondisi saat ini jumlah ASN (15 org) & THL (10 org) - 4 subkoordinator kosong - 6 staff pensiun dan pindah 2.Peningkatan kompetensi SDM yang kurang tepat sasaran	Pembatasan rekrutmen SDM/Pegawai Baru baik ASN maupun Non ASN

Isu strategis RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait capaian kinerja Pembangunan pelaksanaan RPJMD 2018-2023.
2. Misi dan Arah Kebijakan RPJPD 2025-2045.

3. Capaian Kinerja pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dimuat dalam dokumen KLHS RPJMD 2025-2029.
4. Isu strategis dan Indikasi Program RTRW.
5. Arah Kebijakan RPJPD Propinsi Sumatera Barat.
6. Isu aktual (Hasil Konsultasi Publik, Musrenbang dan Perkembangan terkini). Isu actual yang menjadi pembicaraan public dan perlu ditangani segera sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang serius dimasa datang.

Secara umum isu utama sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan review penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Keterbatasan Jarkomdat (Jaringan Komunikasi Data) untuk kegiatan lapangan dikarenakan efesiensi dari Dirjen Dukcapil.
- c. Belum adanya OPD yang memiliki Setifikat ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, sehingga tidak bisa mendapatkan hak akses data kependudukan.
- d. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan.
- e. Adanya Wajib KTP yang tidak berada di Kota Padang Panjang sehingga terkendala dalam melakukan perekaman KTP elektronik yang mengakibatkan capaian kepemilikan KTP kurang dari 100%.
- f. Keterbatasan jumlah SDM, dimana kondisi saat ini jumlah ASN (16 org) & THL (10 org), 4 subkoordinator kosong, 6 staff pensiun dan pindah.
- g. Keterbatasan anggaran sehingga terkendala dalam pelaksanaan aktivitas di lapangan (jemput bola anak sekolah, lansia, ODGJ dan penyandang disabilitas) dan untuk upgrade perlengkapan (hardware dan software)

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 dapat dijelaskan melalui Tabel 2.4

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kesehatan Tahun 2026
Kota Padang Panjang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									2,604,579,600	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang pada Perangkat Daerah	100 %	2,497,003,600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang pada Perangkat Daerah	100 %	2,497,003,600	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2,188,860,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2,188,860,000	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang/bulan	2,161,500,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang/bulan	2,161,500,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16 Dokumen	27,360,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16 Dokumen	27,360,000	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 %	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 %	0	
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	108,700,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	108,700,000	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	15,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	15,000,000	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11,700,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11,700,000	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	80,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	80,000,000	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100 %	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100 %	0	
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	
2.12.01.2.07.0005	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	131,143,600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	131,143,600	
2.12.01.2.07.0006	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	35,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	35,000,000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	96,143,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	96,143,600	
2.12.01.2.08.0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100 %	68,300,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100 %	68,300,000	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38,300,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38,300,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	30,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	30,000,000	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.09.0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kota Padang Panjang	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	38 %	0	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kota Padang Panjang	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	38 %	0	
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	98.84 %				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	98.84 %		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk	100 %	0	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk	100 %	0	
			Perekaman KTP Elektronik	98.05 %				Perekaman KTP Elektronik	98.05 %		
2.12.02.2.01.0004	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	0	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	0	
2.12.02.2.01.0002	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	0	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	0	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0 Dokumen	0	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0 Dokumen	0	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Persentase Pendaftaran Penduduk yang Terlaksana	100 %	0	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Persentase Pendaftaran Penduduk yang Terlaksana	100 %	0	
2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	0 Dokumen	0	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	0 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0 Laporan	0	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0 Laporan	0	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0 Jenis	0	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0 Jenis	0	
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	0	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	0	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kota Padang Panjang	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %	46,152,400	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kota Padang Panjang	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %	46,152,400	
			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %		
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %		
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %		
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Padang Panjang	Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun	1300 Akta	46,152,400	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Padang Panjang	Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun	1300 Akta	46,152,400	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Padang Panjang	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1300 Layanan	46,152,400	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Padang Panjang	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1300 Layanan	46,152,400	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kota Padang Panjang	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100 %	61,423,600	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kota Padang Panjang	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100 %	61,423,600	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	61,423,600	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	61,423,600	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	0	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	0 Dokumen	0	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	0 Dokumen	0	
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	0	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	0	
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	61,423,600	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	61,423,600	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kota Padang Panjang	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	0 %	0	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kota Padang Panjang	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	0 %	0	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Profil dan Agregat Kependudukan	0 Dokumen	0	Penyusunan Profil Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Profil dan Agregat Kependudukan	0 Dokumen	0	
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam proses meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti dokumen kependudukan dan juga tentang capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya mendorong percepatan aktivasi IKD ini. Semua perangkat RT diwajibkan untuk menjadi agen dalam aktivasi IKD di wilayahnya masing-masing. Hal ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan personal.

Wajib aktivasi saat melakukan pelayanan sebagai bentuk dorongan masyarakat yang melakukan pelayanan di kecamatan dan kelurahan diwajibkan untuk melakukan aktivasi IKD penting karena memiliki sejumlah manfaat diantaranya:

- Efisiensi : Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik dalam bentuk digital
- Keamanan : Mengamankan kepemilikan identitas melalui sistem autentikasi yang kuat

Pada Musrenbang RKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Padang Panjang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	N I H I L				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

Dalam Konsep Rancangan Teknoratik RPJMN 2025-2029 Sasaran Visi Indonesia Emas Menuju 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu:

- Pendapatan perkapita setara negara maju
- Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
- Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
- Daya saing Sumber Daya Manusia meningkat
- Intesitas Emisi GRK menurun menuju net zero emission

Sedangkan yang menjadi Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknoratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi yaitu:

- Transformasi Sosial : Pemenuhan pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
- Transformasi Ekonomi : Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
- Transformasi Tata Kelola : Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan

kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil.

- Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia : Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi
- Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi : Memperkuat ketahanan budaya sosial dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Merujuk pada Bab I, ayat 49 dan 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri menyatakan yang dimaksud dengan **Tujuan** dalam kerangka perencanaan pemerintahan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Perumusan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentu harus menunjang rencana pembangunan daerah yang dirumuskan melalui visi - misi pembangunan daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Adapun isi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029: **“SUMATERA BARAT YANG MAJU DAN BERKEADILAN”**

Penjabaran dari visi pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan. Misi ini menjadi penjabaran operasional dari visi yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah, sekaligus menangkap peluang dan potensi strategis yang dimiliki Sumatera Barat.

Berdasarkan misi pembangunan tersebut yang telah dirumuskan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak menjadi urusan yang langsung mendukung salah satu misi. Namun demikian, substansi pengelolaan dan/atau pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berupa pemberian layanan pemerintahan kepada penerima manfaat layanan publik. Oleh karena itu urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melekat pada Misi ke 8 (delapan) dari delapan misi pembangunan tahun 2025-2029, yakni: **“Tata Kelola Pemerintah Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif”**.

Tabel 3.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 8 RPJMD 2025-2029: Tata Kelola Pemerintah Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	Tujuan 1: Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	1.1 Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan untuk semua kebutuhan
		1.2 Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap
		1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
		1.4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang berkaitan langsung dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah pada Prioritas Nasional 04 dan Prioritas Nasional 07.

Secara eksplisit, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada RPJMN 2025-2029 adalah:

- 1) Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun;
- 2) Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP; dan
- 3) Pemutakhiran data kependudukan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 yang menjadi Tugas dan Fungsi melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu

komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahun 2026 dapat dijelaskan melalui Tabel berikut:

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Renstra 2026	Renja 2026
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Inovatif		Indeks Pelayanan Publik	4,22	4,22
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	98,83	98,83
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pemerintahan dan Masyarakat	Persentase Pemanfaatan dan Ketersediaan Data Kependudukan yang Akurat dan Informatif	100	100
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	73,86	73,86

3.3. Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Tahun 2026 antara lain adalah :

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.
2. Penetapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029.
3. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 ditetapkan untuk mewujudkan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang yaitu PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH. Sedangkan untuk Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlibat dalam Misi Ke-III yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Akuntabel, Profesional, Transparan dan inovatif.

Rekapitulasi program dan kegiatan terdiri dari 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Subkegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pendaftaran Penduduk
 - a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - b. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, FOrmulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan.
3. Program Pencatatan Sipil
 - a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 1) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 - a. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan
 - 1) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 yaitu: 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Subkegiatan. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Tahun 2026 serta Review Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Tahun 2025 - 2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tahun 2026. Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas menkoordinasikan pencapaian 1 (satu) indikator tujuan dan 1 (satu) indikator sasaran pembangunan daerah. Namun secara khusus, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Pelayanan Publik”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana table 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Padang Panjang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						2,604,579,600							27,785,451,154	Disdukcapi
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,604,579,600							27,785,451,154	Disdukcapi
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						2,604,579,600							27,785,451,154	Disdukcapi
1.	2,12,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2,497,003,600						-	27,319,715,474	Disdukcapi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2,497,003,600	-	-	-	-	-	100 Persen	27,319,715,474	Disdukcapi
	2.12.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2,188,860,000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata	-	-	26,368,715,474	Disdukcapi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani				
	2.12.01. 2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1414 Orang/Bula n	294 Orang/Bulan	294 Orang/Bulan	224 Orang/Bula n	2,161,500,000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		26,333,715,474	Disdukcapil
	2.12.01. 2.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	80 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	16 Dokumen	27,360,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		35,000,000	Disdukcapil
	2.12.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	108,700,000			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	198,000,000	Disdukcapil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01. 2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10 Paket	1 Paket	1 Paket	2,000,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		3,000,000	Disdukcapil
	2.12.01. 2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 Paket	2 Paket	9 Paket	9 Paket	15,000,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		25,000,000	Disdukcapil
	2.12.01. 2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	11,700,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		0	Disdukcapil
	2.12.01. 2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	80,000,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		170,000,000	Disdukcapil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0 Persen	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	200,000,000	Disdukcapil
	2.12.01. 2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	13 Unit	1 Unit	0 Unit	0	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		200,000,000	Disdukcapil
	2.12.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	131,143,600			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	235,000,000	Disdukcapil
	2.12.01. 2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	35,000,000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		45,000,000	Disdukcapil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											nyeludupan .	Responsif dan Melayani				
	2.12.01. 2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan	6 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	96,143,600	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		190,000,000	Disdukcapil
	2.12.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	68,300,000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	318,000,000	Disdukcapil
	2.12.01. 2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	9 Unit	9 Unit	1 Unit	38,300,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		243,000,000	Disdukcapil
	2.12.01. 2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	0 Unit	0 Unit	5 Unit	30,000,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif,	-		0	Disdukcapil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											nyeludupan .	Responsif dan Melayani				
	2.12.01. 2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	19 Unit	17 Unit	0 Unit	0	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		25,000,000	Disdukcapil
	2.12.01. 2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		50,000,000	Disdukcapil
2.	2,12,02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		-				0						-	203,778,780	Disdukcapil
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	54 Persen	30,93 Persen	34 Persen	38 Persen	0						42 Persen	203,778,780	Disdukcapil
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	97,5 Persen	96,99 Persen	97 Persen	97,1 Persen		-	-	-	-	-	97,2 Persen		Disdukcapil
	2.12.02. 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang Terlayani terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem	-	-	52,145,200	Disdukcapil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani				
			Perekaman KTP Elektronik	99,7 Persen	99,14 Persen	99,2 Persen	99,3 Persen									
	2.12.02. 2.01.000 4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	78 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	0 Laporan	0	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		52,145,200	Disdukcapil
	2.12.02. 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pendaftaran Penduduk yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0 Persen	0			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	151,633,580	Disdukcapil
	2.12.02. 2.02.000 2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	26000 Laporan	5500 Laporan	6000 Laporan	0 Laporan	0	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		151,633,580	Disdukcapil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2,12,03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	46,152,400						-	85,000,000	Disdukcapi
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	46,152,400						100 Persen	85,000,000	Disdukcapi
			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persen	91,8 Persen	100 Persen	100 Persen							100 Persen		Disdukcapi
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen							100 Persen		Disdukcapi
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		-	-	-	-	-	100 Persen		Disdukcapi
	2.12.03. 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	7800 Akta	2000 Akta	1300 Akta	1300 Akta	46,152,400			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	85,000,000	Disdukcapi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03. 2.01.000 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	7800 Layanan	2000 Layanan	1300 Layanan	1300 Layanan	46,152,400	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		85,000,000	Disdukcapil
4.	2,12,04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	61,423,600						-	151,989,900	Disdukcapil
		Meningkatnya Pemanfaatan Informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	61,423,600	-	-	-	-	-	100 Persen	151,989,900	Disdukcapil
	2.12.04. 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	17 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	61,423,600			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	151,989,900	Disdukcapil
	2.12.04. 2.03.000 3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		31,989,900	Disdukcapil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04. 2.03.000 7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	61,423,600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		120,000,000	Disdukcapil
5.	2,12,05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-			-	0						-	24,967,000	Disdukcapil
		Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 Persen	3 Persen	100 Persen	100 Persen	0	-	-	-	-	-	100 Persen	24,967,000	Disdukcapil
	2.12.05. 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil dan Aggregat Kependudukan	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	24,967,000	Disdukcapil
	2.12.05. 2.01.000 1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		24,967,000	Disdukcapil

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2026. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2026. Terlaksananya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada akhirnya semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan selama tahun 2026 akan mendukung tercapainya

Visi dan Misi Kota Padang Panjang untuk mewujudkan “Padang Panjang, Kota Serambi Mekah Yang Maju, Sejahtera dan Bermarwah”.

Padang Panjang, 27 Agustus 2025

Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang



Rudy Suarman, AP
Pembina Utama Muda NIP. 19740918 199311 1 001